

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ruslan. 2013. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Ahmad Fikri Hadin, 2013, *Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah*, Genta Press, Yogyakarta.
- Ahmad Ruslan, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013.
- Aminuddin Ilmar, 2016, *Hukum Tata Pemerintahan, Cetakan Ke-2*, Kencana, Jakarta.
- Ann Seidman dan Robert B. Sjaidman, *Perancangan Undang-Undang Untuk Perubahan Sosial yang Demokratis: Buku Panduan Untuk Anggota Parlemen*,
- Abdul Halim Barkatullah, *Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum*, Jurnal UKSW Budaya Hukum,
- Bagir Manan dan kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 1997.
- Budiman N.P.D Sinaga, *Ilmu Pengetahuan perundang-undangan*, Yogyakarta: UII Press
- Didik Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa, Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*, Setara Perss Kejasama dengan Pusat Kajian Konstitusi Universitas Kanjuruhan, Malang, 2010.
- Dardji Darmodihardjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- E.B. Sitorus, dkk, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa*, DEP DAGRI, Jakarta, 2007,
- HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Hamzah Halim dan Putera, Kemal Redino Syahrul, 2009, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Henry Campbell, *Blacklaw Dictionary*, USA:West Publishing, 1979.
- Henry Arianto, *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Lex Jurnalica Vol. 7, No. 2, April 2010,
- Jean Jacques Rousseau, *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip-Prinsip Hukum politik*, terjemahan dari *Du Contrat Social*. penerjemah Ida Sundari Husen dan Rahayu Hidayat, Dian Rakyat, Jakarta, 1989.
- Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, terjemahan dari *The Theory of*

- Legislation*, penerjemah Nurhadi, M.A, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2010.
- I Gede Pantja Astawa & Suprin Na'a, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundangan-undangan Di Indonesia*, Cet. 1, Ed. 1, Bandung, Alumni, 2008,
- J. Kaloh, 2007, *Mencari Bentuk Daerah, Rineka Cipta*
- Jimly Asshaddiqie, *perihal undang-undang*, cetakan pertama, konstitusi pers, Jakarta, 2006.
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid 1, Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- , *Konstitusi Masyarakat Desa (Piagam Tanggungjawab Dan Hak Asasi Warga Desa)*, Makalah, Diunggah pada laman website: http://www.jimly.com/makalah/namafile/176/KONSTITUSI_MASYARAKAT_DESA.pdf,
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid 1, Konstitusi Pers, Jakarta, 2006.
- , *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- , *Teori Hierarki Norma Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, tahun 2020
- JJ..Buruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, alih bahasa Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996,
- Kushandajani. 2015. *Implikasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa*, Yustisia. 4 (2):
- Lawrence M Friedman, *American Law: An Introduction*, Norton and co, New York, hlm. 5
- Kamus besar Bahasa Indonesia
- Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (Ditjen PDP) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2022
- Made Nurmawati, *Laporan Penelitian: Pembentukan Peraturan Desa Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Fakultas Hukum Udayana, Denpasar, 2018,
- Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers
- Maria Farida Indrawati S., *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Cetakan Kelima, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Moh. Mahmud MD., "Parlemen Desa, Demokratis, dan Beberapa Persoalan Hukum", makalah yang dimuat dalam buku yang disunting oleh Dadang Yuliantara (Penyunting), *Arus Bawah Demokrasi, Otonomi dan Pemberdayaan Desa*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 200.
- Montesquieu, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, terjemahan dari *The Spirit of Law*, penerjemah M. Khoiril Anam, Nusa Media, Bandung, 2015.

- Ni'matul Huda. *Hukum pemerintahan desa: dalam konstitusi Indonesia sejak kemerdekaan hingga era reformasi*. Setara Press. Malang. 2015
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Philipus M Hadjon et. al , *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.
- , *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010.
- , *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- , *Tentang Wewenang*, Majalah Yuridika No. 5 dan 6 Tahun XII Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1997.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1981.
- Pantja Astawa, Suprin Na'a, 2008, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Rencana Strategis 2018-2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan
- Ridwan, H.R. 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Rival Gulam Ahmad, *Manual Perancangan Peraturan Untuk Transformasi Sosial*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (LPSHK), Jakarta, 2005.
- Safri Nugraha, Tri hayati, Anna Erliyana, et.al., *Hukum Administrasi Negara*, edisi revisi,
- Setandjo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, 2002,
- Soerojoo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1983, hlm. 31
- Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984
- Sadjijono, 2008, *Bab Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang PRESSindo.
- Saiful Anwar, 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Manadi Press, Jakarta.
- SF. Marbun et.al. 2001. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Penyunting FH UII Press. Yogyakarta.
- Soetardjo Kartohadikusumo, *desa*, Cetakan Pertama, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1948.
- Sujamto, 1994, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sujanto, 1986, *Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia.
- Sutoro Eko, 2003, *Meletakkan Desa Dalam Desantralisasi dan Demokrasi*", dalam Abdul Gaffar Karim (Editor), *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Pustaka Pelajar

- Kerjasama dengan jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UGM, Yogyakarta. "APMD", Yogyakarta: APMD Press
- , 2005, *Manifesto Pembaruan Desa, Persembahan 40 tahun STPMD*
- Eko Sutoro. 2015. *Regulasi Baru Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi RI.
- Syahrul Yasin Limpo, *Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Bersih dan Berwibawa Melalui Penerapan Pengawasan Hukum Yang Konsisten*, (Cetakan Pertama) Litera, Yogyakarta, 2018.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 2013
- Umar Nain,. 2019. *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris*. Makassar: Garis Khatulistiwa.
- Van Der Vlies dalam Yuliandri, *Ibid*, hal 13. Yuliandri, *Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang berkelanjutan*,(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2010).
- Widjaja Haw, *Otonomis Desa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,
- Yuliandri. 2010. *Asas-Asas Pembentukan PeraturanPerundang-undangan yang baik*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

- Aditia Syaprillah, *Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan*, Jurnal Bina Hukum Lingkungan Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016.
- Eddy Asnawi, Yasrif Yakub Tambusai, Andrew Shandy Utama. "Penataan Kewenangan dan Mekanisme Pembatalan Peraturan Desa dalam Kerangka Otonomi Desa di Indonesia". JCH: Jurnal Cendikia Hukum. Vol. 7. No. 1. 2021.
- Fajar Nurhardianto, *Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia*, Jurnal TAPIs, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2015,
- Jendi Taraja Simamora, Haposan Siallagan, Hisar Siregar. "Kedudukan Peraturan Desa dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". PATIK: Jurnal Hukum, Vol. 8, No. 2, Agustus 2019,
- Jalaluddin, *Hakikat Dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik*, Jurnal Aktualita (Bandung, Penerbit Pascasarjana Unisba, 2011) Vol 6, No 3 , 2011
- Ismail, I., Moenta, A. P., & Aspan, Z. (2021). Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar pada Pembentukan Peraturan Daerah Responsif. *SASI*, 27(3), 277-287.

- Marwanto dan Yusri Munaf. "Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 (Studi di Desa Hangtuh Kecamatan perhentian raja". Wedana: Jurnal pemerintah, Politik dan Birokrasi, Vol. II, No. 1 Oktober 2016. Hlm. 212
- Muhammad Syirazi Neyasyah. "Keberlakuan Yuridis Peraturan Desa dalam Perspektif Asas Formal Kelembagaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". UBELAJ, Vol. 4, No. 1. April 2019. Hlm. 23
- Naswar, N., Wahid, M. Y., Aminuddin, A., Bachri, S., Arie, M., & Hakim, M. Z. (2019). Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 22(2), hal 88
- Prio Teguh dan Baiq Aprimawati. "Penyusunan Regulasi Desa Berdasarkan UU 6/2014 di kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat". *Jurnal Konstituen*, Vol. 1. No. 2, Juni 201
- Robert B. Seidman, *Drafting for the Rule of Law: Maintaining Legality in Developing Countries*, Yale Journal of International Law, Volume 12, Issue 1, Article 4, 1987, <https://pdfs.semanticscholar.org/c47b/1fc438505cec2639c3ae7dcb5a0253cf48a9.pdf>,.
- _____, *Law and Development: The Interface Between Policy and Implementation*, Boston College Third World Law Journal, Volume 2, Issue 1, Article 6, 1981, <http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1407&context=twlj>,.
- Ronan Cormacain, *Legislative Drafting and the Rule of Law*, Institute of Advanced Legal Studies, School of Advanced Study, University of London, PhD Thesis, 2017, <https://pdfs.semanticscholar.org/8573/69dd2203b40f77f3c65afdd9de9210fa3098.pdf>,
- Samderubun, F., Ruslan, A., & Halim, H. (2021). Optimalisasi Fungsi Legislasi Badan Musyawarah Kampung. *SASI*, 27(3), 314-322.
- Suwandi. 2018. Program Pembentukan Peraturan Daerah Perkembangan Dan Permasalahannya (Kajian Yuridis Normatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 15 (3): 146
- Saiful. 2014. Eksistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 6 (2): 3
- Simarmata, Jorawati, and Damai Magdalena. "Kedudukan Dan Peranan Peraturan Desa Dalam Kerangka Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait (Position And Role Of Village Regulation In The Frame Of Village Autonomy Based Of

- The Law Number 6 Of 2014 On Village And Other Related Laws And Regulations)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 3 (2018).
- Umar Marhum, Maja Meronda. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut UU 6/2014: Studi Kasus Desa Wawonsanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara". *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*. Vol. 2, No. 12, Juli 2021. Hlm. 144
- Tonye Clinton Jaja, *Legislative Drafting and Statutory Interpretation: a Comparative Analysis of the United Kingdom and Nigeria*, *Journal of Comparative Law*, University of Warsaw, Volume 2 – Issue 1, Spring 2015, ISSN 235343358 (Print), ISSN 23534642 X (Online) <http://www.uwjcl.wpia.uw.edu.pl/upload/UWJCL-Volume1Issue1January2014-5.pdf>,
- Zulkarnain Ridlwan. 2014. Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu*, 8 (3): 425
- Zhaudiva Azzahra Putri, Rahayu Subekti. "Teori Legislasi dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja". *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1. No. 1, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Pasal 212 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965.tentang tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Pedoman
Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
Naskah Akademik RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, Badan Legislasi DPR RI, Jakarta, 2010.
Naskah Akademik RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, Badan Legislasi DPR RI, Jakarta, 2010.
Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLN-RI) Nomor
5495.
Risalah Rapat Panitia Khusus DPR RUU tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, Rabu, 26 Januari 2011.

Website

<http://jimly.com/tanyajawab?page=2>

hukum.uns.ac.id/downloadmateri.php.

<https://www.matamaros.com/2021/09/20/tiga-desa-perdes-kan-larangan-perkawinan-anak-kalau-nekat-ada-sanksi/>

<https://www.ekspospedia.com/11129/bupati-kolaka-keluarkan-instruksi-penanggulangan-perdes-pungutan-desa-muara-lapao-pao.html>